

**PENERAPAN PRINSIP KERJA SAMA DAN PRINSIP KESOPANAN
DALAM TUTURAN IR. JOKO WIDODO PADA VIDEO DEBAT
PILPRES 2019**

¹Ni Luh Putu Yumi Kusuma, ²I Nyoman Sudiana, ³I Wayan Rasna

Program Studi Pendidikan Bahasa
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

¹yumi.kusuma@undiksha.ac.id, ²nyoman.sudiana@pasca.undiksha.ac.id,
³wayan.rasna@pasca.undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 dan (2) penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Subjek penelitian ini adalah tuturan Ir. Joko Widodo, sedangkan objeknya adalah prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi video debat Pilpres 2019 dengan teknik simak dan catat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu data. Analisis data yang dilakukan ada tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kerja sama sudah diterapkan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Pada tuturan tersebut terdapat penerapan empat maksim yang ada dalam prinsip kerja sama, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Selain itu, prinsip kesopanan juga sudah diterapkan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Pada tuturan tersebut terdapat penerapan enam maksim yang ada dalam prinsip kesopanan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian.

Kata kunci: Debat; Prinsip Kerja Sama; Prinsip Kesopanan

Abstract

This qualitative research aimed to describe (1) the application of cooperative principle in speech Ir. Joko Widodo in 2019 Presidential Election debate video and (2) the application of the principle of politeness in the speech of Ir. Joko Widodo in 2019 Presidential Election debate video. The subject of this study was speech of Ir. Joko Widodo, while the objects were the cooperative principle and the principle of politeness. This research used a data collection method in the form of documentation of the 2019 Presidential debate video with the technique of listening and note taking. The instrument used in this study was data card. The data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data display, and conclusion. The results showed that cooperative principle had been applied in the speech of Ir. Joko Widodo in the 2019 Presidential Election debate video. In the statement there are four maxims contained in the cooperative principle, namely maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance, and maxim of manner. In addition, the principle of politeness has also been applied in the speech of Ir. Joko Widodo on the 2019 Presidential Election debate video. In the speech there were six maxims contained in the principle of politeness, namely the maxim of wisdom, maxim of generosity, maxim of appreciation, maxim of humility, maxim of compatibility, and maxim of sympathy.

Keywords: Debate; Cooperative Principle; Principle Of Politeness

PENDAHULUAN

Peristiwa komunikasi akan efektif jika berhasil menerapkan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasar komunikasi yang dapat diterapkan misalnya prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan atau kesopanan. Prinsip kerja sama bersifat

kooperatif. Prinsip kerja sama harus dilakukan oleh penutur dan mitra tutur, agar proses berkomunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila semua pelaku komunikasi tidak menerapkan prinsip kerja sama dalam berkomunikasi, akan terjadi kesalahpahaman komunikasi

antarpeserta tutur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wijana (1996:46) secara ringkas dapat diasumsikan bahwa ada semacam prinsip kerja sama yang harus dilakukan pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi itu berjalan dengan lancar. Grice (dalam Putrayasa, 2015:102) menyatakan prinsip kerja sama menyangkut maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*).

Berkaitan dengan prinsip kesopanan, menurut Yule (2014:104) kesopanan dikatakan sudah lazim apabila diperlakukan sebagai suatu konsep yang tegas, seperti gagasan tingkah laku sosial yang sopan dan etika yang terdapat dalam budaya. Hal ini dimungkinkan untuk menentukan sejumlah prinsip-prinsip umum yang berbeda agar menjadi sopan dalam interaksi sosial dalam suatu budaya khusus. Sebagian dari prinsip-prinsip ini tergolong sifat bijaksana, pemurah, rendah hati, serta simpatik terhadap orang lain. Leech (dalam Putrayasa, 2015:108) menyatakan prinsip kesopanan meliputi maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian.

Peristiwa komunikasi yang menerapkan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan ini dapat diamati dalam pesta demokrasi Indonesia pada 17 April 2019. Pergantian pemimpin dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada saat itu. Pemilihan umum tersebut dilakukan untuk menentukan Presiden, DPRRI, DPR, DPRD, dan DPD. Pemilihan umum yang serentak ini cukup memberikan euforia bagi warga Indonesia karena cukup banyak kandidat yang ada dan berkampanye untuk mencapai kemenangannya. Namun, dari kelima jenis pemilihan itu, yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah pemilihan Presiden Republik Indonesia.

Salah satu hal yang sangat menyita perhatian publik adalah pada tahap debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kedua pasangan capres dan cawapres pada tahap debat

saling beradu argumentasi guna memaparkan visi, misi, program, dan wawasannya. Hal ini menarik perhatian publik karena debat tersebut dapat memberikan gambaran umum mengenai wawasan capres dan cawapres serta memberi gambaran sosok yang kiranya dapat ditunjuk sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Hendrikus (1991:120) menyatakan bahwa debat adalah saling adu argumentasi antarpribadi atau antarkelompok dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Debat merupakan salah satu peristiwa komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Debat juga memiliki tujuan untuk memenangkan suatu hal. Tujuan debat pada umumnya adalah usaha untuk mencapai kemenangan dalam bertutur. Kemenangan tersebut berkaitan dengan kemenangan yang bersifat politis. Debat politik merupakan bahan kampanye yang sering digunakan dalam pemilu. Penggunaan debat sebagai bahan kampanye secara umum bertujuan untuk memberikan informasi terkait visi dan misi kandidat melalui mekanisme debat antarpasangan dalam pemilu.

Bahan kampanye adalah semua bentuk yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang dipublikasikan untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan memersuasi orang memilih peserta pemilu. Debat merupakan bahan kampanye yang efektif untuk memersuasi para pemilih. Melalui debat, kandidat dalam pemilu mampu menawarkan visi, misi, program, serta wawasannya kepada publik.

Penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dapat dilihat dalam peristiwa komunikasi debat Pilpres 2019. Debat sebagai wujud kegiatan berbicara tidak terlepas dari prinsip yang terdapat dalam peristiwa komunikasi. Di dalam peristiwa komunikasi, baik penutur maupun mitra tutur menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya. Semua penutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah

kebahasaan di dalamnya. Selain itu, saat pelaksanaannya, pelibat debat berargumentasi dan akan memiliki interpretasi makna yang disesuaikan dengan konteksnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Cummings (2007:6) yang menyatakan bahwa orang-orang yang berargumentasi secara rutin akan meninggalkan premis-premis yang tersirat dengan harapan bahwa premis-premis ini dapat disusun kembali berdasarkan konteks argumentasi.

Ir. Joko Widodo dapat dijadikan tokoh sentral dalam debat Pilpres 2019. Dikatakan demikian karena pada saat itu pula Ir. Joko Widodo masih memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai tokoh yang sudah pernah memimpin negara, masyarakat tentu memiliki titik fokus pada penguasaan pengetahuan serta tuturannya. Hal ini akan menjadi sebuah bahan pertimbangan masih atau tidaknya Ir. Joko Widodo bisa dipilih kembali sebagai presiden di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri pula, fenomena yang ada di Indonesia adalah Ir. Joko Widodo memiliki sejumlah prestasi sekaligus cercaan dari masyarakat Indonesia.

Peristiwa berbahasa dalam debat sangat berkaitan dengan kekuasaan untuk mencapai tujuan politik, yaitu mengambil simpati masyarakat untuk memenangkan pemilihan presiden. Kualitas pengetahuan dan komunikasi Ir. Joko Widodo dapat diketahui melalui debat Pilpres 2019 ini. Hal tersebut dapat disimak dalam setiap jawaban Ir. Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan yang muncul, baik itu pertanyaan yang dikeluarkan moderator maupun dari pihak lawan. Misalnya pada debat sesi pertama yang bertema "Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme" moderator membacakan pertanyaan "Di masyarakat, kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkrit agar dapat secara jelas menggambarkan masalah yang sedang dihadapi."

Adapun jawaban Ir. Joko Widodo

"Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM, misalnya penahanan tersangka. Memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi, penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi, kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti, yang kedua mungkin tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, ya silahkan. Ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat pra peradilan misalnya. Jadi, jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM."

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan oleh Ir. Joko Widodo dapat dikatakan berkualitas karena menuntaskan semua pertanyaan moderator dengan penjelasan yang tepat mengenai penindakan hukum dan HAM. Ir. Joko Widodo berpendapat bahwa keduanya adalah hal berbeda yang tidak boleh dipertentangkan karena penegakan hukum memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan kepada seorang tersangka. Dalam jawaban itu pula, Ir. Joko Widodo telah memberikan contoh kasus konkrit, yaitu kasus korupsi. Memang sepatutnya korupsi harus diberantas demi kesejahteraan masyarakat walaupun menghilangkan kebebasan tersangkanya karena tindakan korupsi menyalahi aturan negara.

Kutipan pendapat yang diberikan oleh Ir. Joko Widodo tersebut termasuk dalam penerapan prinsip kerja sama maksim kualitas, yaitu jawaban atau respons hendaknya didasarkan pada bukti yang memadai. Masih banyak tuturan yang dapat dianalisis dalam debat ini. Sebagian besar, tuturan Ir. Joko Widodo menerapkan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dalam debat. Hal itu membuktikan bahwa prinsip dasar diterapkan dalam mengeluarkan isi pengetahuan sekaligus melancarkan tujuan komunikasi, sehingga dapat dijadikan sebuah referensi oleh

masyarakat yang ingin memilih Ir. Joko Widodo kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan ini akan dibahas mengenai analisis prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan pada tuturan Ir. Joko Widodo saat pelaksanaan debat Pilpres 2019. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan yang ada dalam tuturan.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan deskriptif kualitatif karena rancangan ini mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ir. Joko Widodo. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber pada tulisan, seperti buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2005:158). Dalam metode ini, data dikumpulkan untuk dipergunakan sebagai bukti atau keterangan di dalam melakukan pengkajian dan penelaahan, seperti tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Teknik yang digunakan adalah simak dan catat. Peneliti menyimak video debat kemudian mencatat tuturan Ir. Joko Widodo. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul diuji keabsahannya oleh pihak lain agar benar-benar valid. Kemudian, data yang sudah valid dapat dianalisis.

Instrumen penelitian yang dipilih berkaitan erat dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Menurut Wendra (2014:33), instrumen penelitian sangat terkait pula dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Jika metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, instrumen penelitian adalah alat yang sifatnya lebih teknis dan

operasional untuk memperoleh data. Sesuai dengan metode yang digunakan, instrumen dalam penelitian ini adalah kartu data. Saat melakukan pengumpulan data, hasilnya akan dicatat dalam kartu data. Unit data yang dianalisis yaitu satuan konteks ujaran.

Setelah data diperoleh, tugas peneliti selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif artinya jenis penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan metode statistik (Suandi, 2008:7). Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini diarahkan pada identifikasi dan klasifikasi untuk mendapatkan deskripsi yang jelas, rinci, dan memadai berkenaan dengan (1) penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 dan (2) penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019.

Tahapan pertama dalam analisis data ini adalah reduksi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui data yang didapat valid atau tidak valid. Data yang ingin peneliti kumpulkan adalah (1) penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 dan (2) penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Video debat Pilpres 2019 yang sudah diunduh dari media Youtube disimak dan ditranskrip tuturannya. Kemudian, dipilih data yang valid dan menerapkan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan. Untuk membuktikan keabsahan data, pada tahap ini dilakukan pula validitas data dengan bantuan pihak lain.

Tahapan kedua adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan hal-hal yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian sesuai dengan rumusan masalah. Unit data yang dianalisis yaitu satuan konteks ujaran. Data berupa (1) penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 dan (2) penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Data yang valid disajikan dalam kartu data dan

digolongkan ke dalam jenis maksim pada penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan.

Tahapan ketiga adalah penyimpulan. Penyimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat diperoleh informasi mengenai (1) penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 dan (2) penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan hasil adanya penerapan prinsip kerja (maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan) dan prinsip kesopanan (maksim kebijaksanaan, maksim penghargaan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian) dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Berikut adalah rinciannya.

Tabel 1. Rincian Data Hasil Penelitian

Prinsip	Maksim	Jumlah	Persentase
Prinsip Kerja Sama	Kualitas	1	20%
	Kuantitas	1	20%
	Relevansi	2	40%
	Pelaksanaan	1	20%
	Kebijaksanaan	2	28,6%
Prinsip Kesopanan	Penghargaan	1	14.3%
	Kedermawanan	1	14.3%
	Kerendahan Hati	1	14.3%
	Kecocokan	1	14.3%
	Kesimpatian	1	14.3%

Dari pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan data hasil penelitian, dapat diketahui beberapa temuan yang diperoleh. Adapun temuan-temuan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan pada penelitian ini juga berdasarkan rumusan masalah

yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Temuan pertama yaitu adanya penerapan empat maksim yang ada dalam prinsip kerja sama. Grice (melalui Wijana, 1996: 46) mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (*conversational maxim*), yaitu maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*). Sejalan dengan teori Grice tersebut, berdasarkan hasil analisis penerapan prinsip kerja sama yang sudah mencakup keempat maksim tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu melancarkan tujuan komunikasi dalam debat.

Pertama, ditemukan penerapan prinsip kerja sama maksim kuantitas pada tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. "*Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar- standar yang jelas.*" Konteksnya adalah politik berbiaya tinggi memicu tingginya tindakan korupsi pejabat di Indonesia. Tuturan Ir. Joko Widodo sangat tepat dikatakan menerapkan maksim kuantitas karena memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya dengan tepat sasaran dan tidak berlebihan. Misalnya, ketika Moderator menanyakan strategi Ir. Joko Widodo dalam mengatasi politik berbiaya tinggi di Indonesia, beliau memberikan respons seputar strategi pribadinya juga.

Kutipan tersebut menandakan respons Ir. Joko Widodo telah menerapkan maksim kuantitas ini. Tujuan penggunaan maksim ini adalah untuk memberikan informasi penting yang sesuai dengan kebutuhan mitra tutur Ir. Joko Widodo, dalam hal ini mitra tuturnya adalah moderator debat. Pembahasan diatas membuktikan pendapat (Leech,1993:128), dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin.

Kedua, penerapan maksim kualitas.

Penerapan maksim ini sudah ada dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. *“Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM, misalnya penahanan tersangka. Memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi, penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi, kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti, yang kedua mungkin tersangka tidak melarikan diri.”* Konteksnya adalah di masyarakat, kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan HAM.

Tuturan Ir. Joko Widodo sudah menerapkan maksim kualitas untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada mitra tuturnya. Misalnya saja ketika moderator mempertanyakan tanggapan Ir. Joko Widodo tentang pertentangan penegakan hukum dan HAM dari segi kasus-kasus konkrit, beliau menanggapi dengan tuturan yang mengandung penjelasan pelaksanaan hukum dan HAM yang sesuai keadaan nyata di lapangan. Dalam tuturan Ir. Joko Widodo juga tercantum contoh nyata yang ada sebagai indikasi penerapan maksim kualitas dalam prinsip kerja sama ini. Kutipan tersebut sebagai bukti bahwa maksim kualitas telah diterapkan dalam tuturan Ir. Joko Widodo. Dalam tuturan itu, terdapat kasus-kasus konkrit yang terjadi di Indonesia sebagai penjelasan dan sumber informasi mengenai penegakan hukum dan HAM yang kerap dipertentangkan. Jadi, tujuan maksim kualitas yang diketahui untuk memberikan informasi secara nyata sudah diterapkan dalam tuturan Ir. Joko Widodo. Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hermawan (2015) bahwa diperlukan uraian fakta yang dapat mendukung tuturan dalam maksim kualitas.

Ketiga, penerapan prinsip kerja sama maksim relevansi. *“Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering grusa-grusu, menyampaikan sesuatu misalnya apa? Jurkamnya Pak Prabowo misalnya, katanya dianiaya,*

mulanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik.” Konteksnya adalah Prabowo berpendapat tanpa bukti yang jelas dan adanya kasus juru kampanye Prabowo pernah menyatakan dirinya dianiaya oleh orang namun hanya fiktif belaka.

Tuturan Ir. Joko Widodo sudah menerapkan maksim ini. Pertanyaan yang dimunculkan dari moderator debat ataupun tim lawan ditanggapi dengan menerapkan maksim relevansi guna memenuhi informasi yang diinginkan mitra tutur secara relevan dan berkaitan. Hal tersebut akan membawa komunikasi ke arah yang efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Penerapan maksim relevansi ini misalnya pada saat Ir. Joko Widodo menanggapi pernyataan Prabowo mengenai pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan partai. Dalam tuturan yang beliau keluarkan, dipaparkan proses beliau memberdayakan kaum perempuan dalam susunan kabinetnya. Beliau juga memberikan penjelasan bahwa kaum perempuan tersebut menempati tempat-tempat strategis seperti menteri dan Panca KPK. Namun, terkadang secara tersurat (eksplisit) respons yang diberikan tidak terlihat relevansinya dengan pokok pembicaraan, karena sudah ada latar belakang pengetahuan (*background knowledge*) yang sama antara penutur dan mitra tutur maka komunikasi masih tetap bisa berjalan (Putrayasa, 2015:105).

Sesuai dengan teori tersebut, temuan maksim relevansi seperti itu juga ada pada tuturan Ir. Joko Widodo ketika Prabowo mengatakan aparat hukum berat sebelah dan sempat menangkap seorang kepala desa yang menjadi pendukung Prabowo. Berdasarkan tuturan tersebut, terdapat latar belakang pengetahuan si penutur sebelumnya yang sudah diketahui lawan tuturnya pula mengenai kasus juru kampanye Prabowo yang tidak terbukti dianiaya. Itulah penerapan maksim relevansi dalam tuturan Ir. Joko Widodo dalam video debat Pilpres 2019. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rakasiwi dkk (2014) bahwa kemunculan maksim relevansi lebih menonjol pada prinsip kerja sama. Hal tersebut karena proses

komunikasi mementingkan tercapainya informasi yang relevan.

Keempat, penerapan maksim pelaksanaan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Maksim pelaksanaan menuntut penutur berbicara runtut, tidak taksa, tidak kabur, dan tidak mengandung ambiguitas agar tidak menimbulkan kebingungan. Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini, tuturan Ir. Joko Widodo menerapkan maksim pelaksanaan untuk memberikan informasi yang tidak menimbulkan ambiguitas, ketaksaan, atau hal-hal yang belum bisa dibuktikan. Untuk menghindari itu, penting diterapkan maksim pelaksanaan ini dalam debat agar informasi yang didapatkan mitra tutur benar adanya dan tidak menimbulkan makna ganda. Maksim pelaksanaan sudah diterapkan dalam tuturan Ir. Joko Widodo terhadap pertanyaan moderator sekaligus menanggapi jawaban Sandiaga mengenai diskriminasi dan persekusi yang melanggar HAM.

“saya selalu mengajak marilah kita menjaga ukuah islamiah kita, menjaga ukuah batoniah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh tadi. Ya, gampang sekali, laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.” Konteksnya adalah Masih ada kasus diskriminasi dan persekusi di Indonesia karena adanya perbedaan agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Dalam tuturannya, Ir. Joko Widodo memaparkan bahwa yang terpenting adalah melaporkan jika kasusnya memang nyata terjadi disertai dengan bukti, maka mekanisme hukum akan berjalan dan pelaku ditindak tegas. Selain itu, tuturan Ir. Joko Widodo juga memuat strategi untuk menurunkan angka diskriminasi melalui penegakan rasa persatuan, persaudaraan, dan kerukunan.

Temuan kedua yaitu adanya penerapan enam maksim yang ada dalam prinsip kesopanan. Leech (dalam Chaer, 2010:10) mengemukakan teori kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan yang dijabarkan dalam bentuk maksim (ketentuan, ajaran). Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan

dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut “tatakrama”. Walaupun dalam debat, aturan kesantunan tetap dijunjung melalui etika berbicara. Dalam debat ini, khususnya tuturan Ir. Joko Widodo sudah menerapkan keenam maksim dalam prinsip kesantunan atau prinsip kesopanan yang sesuai dengan teori Leech (dalam Chaer, 2010:10).

Pertama, maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesopanan. *“Saya akan lakukan revisi-revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali undang-undang yang tidak pro kepada investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita, karena menurut saya, hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya.”* Konteksnya adalah masih banyak tumpang tindih hukum di Indonesia. Adanya prinsip kebijaksanaan ini bertujuan untuk mengurangi keuntungan diri sendiri dan meningkatkan kepentingan orang lain. Tuturan Ir. Joko Widodo sudah menerapkan maksim kebijaksanaan dalam video debat Pilpres 2019.

Maksim kebijaksanaan ini tampak pada beberapa jawaban dalam debat yang mempertanyakan kebijakan seorang Ir. Joko Widodo ketika menghadapi permasalahan yang ada. Seperti pada keadaan tumpang tindih hukum yang masih ada dalam pemerintahan Ir. Joko Widodo selama empat tahun yang dipertanyakan oleh Sandiaga. Dari tuturan Ir. Joko Widodo tersebut tampak penerapan maksim kebijaksanaan. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya selama ini, beliau mengeluarkan kebijaksanaan akan merevisi atau memperbaiki undang-undang untuk dapat digunakan ke depannya secara lebih baik sehingga rakyat bisa terlindungi.

Penerapan maksim kebijaksanaan juga tampak pada tuturan Ir. Joko Widodo ketika Prabowo berpendapat bahwa jabatan semestinya diberikan kepada orang-orang netral, bukan orang yang

bergelut dalam partai. Kebijakan yang beliau keluarkan adalah tidak mendiskriminasi seseorang dalam memberikan sebuah jabatan. Yang beliau pentingkan adalah proses rekrutmen yang tepat, sehingga lahir orang yang berkompeten dengan tepat, tanpa memandang orang partai atau bukan orang partai. Jadi, jawaban yang bijaksana muncul ketika Ir. Joko Widodo menganggap semua sama saja, baik itu orang partai atau nonpartai, tanpa ada unsur diskriminasi, dan itu jelas menerapkan maksim kebijaksanaan.

Kedua, penerapan maksim penerimaan atau kedermawanan. *"Pemerintah kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu, baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas. Kemudian juga, yang berkaitan dengan kesetaraan bisa saya berikan contoh di dalam even ASEAN PARA GAME. Ini even disabilitas terbesar di ASIA. Kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di ASEAN GAME."* Konteksnya adalah Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik.

Tuturan Ir. Joko Widodo sudah termasuk maksim kedermawanan karena adanya penghormatan terhadap orang lain. Misalnya saja ketika membicarakan kaum disabilitas, Ir. Joko Widodo sangat menghargai seteraan dan kesejahteraan mereka. Salah satu contoh nyata yang dituturkan adalah pemberian hak yang sama antara atlet kaum disabilitas dan atlet biasa saat berlaga di ASEAN PARA GAME dan ASEAN GAME. Tanpa membedakan keduanya, bonus yang diberikan disamakan demi menghormati kaum disabilitas yang juga sama-sama mengharumkan nama bangsa. Selain itu, untuk menghormati kaum disabilitas, berbagai fasilitas juga telah disediakan baik itu di bidang pendidikan, tempat tinggal, pemenuhan hak-hak, dan lainnya. Sejalan dengan Rahardi (2005:61) yang mengatakan bahwa dengan maksim kedermawanan, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain.

Ketiga, penerapan maksim penghargaan. *"Menurut saya biasa menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu. Tidak, tidak, buat saya bukan sesuatu yang tidak baik. Malah baik, karena ada saling mengontrol dan masyarakat juga tahu."* Konteksnya adalah Banyak perbedaan pendapat antarmenteri dalam kepengurusan Ir. Joko Widodo. Tuturan Ir. Joko Widodo sudah menerapkan maksim ini dalam debat Pilpres 2019. Salah satunya adalah ketika Prabowo mempermasalahkan menteri-menteri Ir. Joko Widodo yang saling berseberangan pendapat. Dalam hal ini, Ir. Joko Widodo mengeluarkan pendapat bahwa beliau lebih menghargai perbedaan pendapat yang dialami beberapa menterinya saat bertugas demi sebuah kebaikan, yaitu adanya saling kontrol dan saling mengawasi satu dengan lainnya. Kutipan tersebut termasuk menerapkan maksim penghargaan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Hal ini sesuai penjelasan Rahardi (2005:63) bahwa maksim penghargaan menuntut bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain.

Keempat, penerapan maksim kerendahan hati sudah ada dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pipres 2019. *"Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial."* Konteksnya adalah Politik berbiaya tinggi masih banyak di Indonesia. Maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut adanya perasaan rendah hati yang dimiliki oleh seorang penutur saat berbicara dengan mitra tuturnya. Misalnya ketika Prabowo mengatakan bahwa pejabat seharusnya diberikan finansial yang lebih bayak agar tidak terjadi kasus korupsi, Ir. Joko Widodo justru menilai besarnya finansial tidak begitu berpengaruh dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki seseorang. Dengan kerendahan hati, Ir. Joko Widodo

menjelaskan perjalanan dirinya ketika melaksanakan pemilu yang menggunakan sangat sedikit uang. Yang terpenting dalam prosesnya itu adalah relawan yang membantu kesuksesan jalannya pemilu. Kutipan tersebut mengindikasikan penerapan maksim kerendahan hati yang berisi tuturan rasa rendah hati dalam diri penutur.

Kelima, penerapan maksim kecocokan. *“Saya kira tadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi.”* Konteksnya adalah Kaum disabilitas sudah banyak yang mendapat kesetaraan di berbagai bidang. Maksim kecocokan ini ada pada tuturan Ir. Joko Widodo yang menanggapi pernyataan Sandi tentang kesetaraan disabilitas dalam berbagai bidang. Tuturan yang diungkapkan Ir. Joko Widodo cocok dengan pernyataan Sandi. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa yang dikatakan Sandi sudah mirip dengan yang ia sampaikan. Wijana (1996: 59) menggunakan istilah maksim kecocokan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka. Sejalan dengan pengertian tersebut, maksim kecocokan ini adalah sebuah persamaan pendapat dalam sebuah tuturan. Walaupun dalam tataran debat, namun ditemukan sebuah data yang menerapkan maksim kecocokan ini.

Keenam, penerapan prinsip kesopanan pada maksim yang terakhir, yaitu maksim kesimpatian. *“Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan, sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini, sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung.”* Konteksnya adalah rendahnya posisi Indonesia dalam aspek infrastruktur menurut Global Kompetitif Report 2018. Maksim ini adalah wujud adanya rasa simpati terhadap orang lain. Memiliki rasa simpati dapat diartikan bahwa orang tersebut bersikap sopan. Begitu pula pada sebuah tuturan. Tuturan yang berindikasi simpati terhadap orang lain akan termasuk dalam penerapan maksim kesimpatian.

Tuturan Ir. Joko Widodo ada yang

menerapkan maksim kesimpatian, yaitu saat ditanyakan oleh moderator mengenai kondisi infrastruktur di Indonesia yang masih menduduki peringkat ke-71 dari 140 negara. Tuturannya dalam menjawab pertanyaan moderator tersebut memiliki unsur kesimpatian dalam bentuk melakukan usaha demi keadaan infrastruktur yang lebih baik. Dalam kutipan tersebut tampak unsur keseriusan rasa simpati seorang Ir. Joko Widodo dalam menanggapi masalah infrastruktur di Indonesia dan jelas sudah menerapkan maksim kesimpatian.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan maksim relevansi dan maksim kebijakan lebih digunakan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019. Penggunaan maksim relevansi ini muncul karena dalam tuturan Ir. Joko Widodo memang banyak mengandung informasi yang relevan dalam menjawab mitra tuturnya dalam debat. Selain itu, konteks tuturan juga mendukung adanya penerapan maksim relevansi ini. Hal ini sejalan dengan teori Firth (dalam Rokhman dan Surahmat, 2020:149) menyatakan bahwa fungsi bahasa tidak dapat dipisahkan dengan realitas sosial di tempat penuturnya hidup dan berelasi dengan orang lain. Jadi penerapan maksim relevansi memerlukan konsep konteks.

Adapun penerapan prinsip kesopanan didominasi oleh maksim kebijaksanaan. Sebagai seorang yang dikenal pernah menjadi presiden di Republik Indonesia, tuturan Ir. Joko Widodo lebih menekankan pada kebijaksanaan untuk mengambil keputusan untuk keperluan negara. Bahkan dalam tuturannya, beliau menampilkan makna tuturan bahwa kepentingan negara diutamakan dibandingkan dengan pribadi. Hal tersebut sesuai teori Rahardi (2005: 60) mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur.

Penelitian ini senada dengan hasil

penelitian Rakasiwi dkk tahun 2014 berjudul Penerapan “Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Saintifik oleh Siswa Kelas IV SD Jembatan Budaya” yang menghasilkan bahwa penerapan maksim relevansi lebih menonjol karena ingin memenuhi tujuan komunikasi yang berhubungan. Di sisi lain, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Arta tahun 2016 berjudul “Prinsip Kerja sama dan Kesantunan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Saintifik” yang menyatakan bahwa dalam berinteraksi diperlukan komitmen untuk bekerja sama guna terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tentu kerja sama itu dilandasi dengan pemakaian tuturan dengan prinsip kesantunan. Begitu pula halnya dalam debat diperlukan sebuah komitmen untuk bekerja sama guna tercapainya tujuan komunikasi dan tetap mempertahankan unsur kesopanan atau kesantunan demi menjaga perasaan mitra tutur.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa tuturan Ir. Joko Widodo sudah menerapkan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan. Penerapan tersebut memenuhi seluruh maksim dalam prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan. Namun, tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 hanya dominan pada salah satu jenis maksim dalam prinsip kerja sama juga prinsip kesopanan. Padahal, penerapan jenis maksim lainnya juga penting diterapkan dalam peristiwa komunikasi.

Data yang dominan pada prinsip kerja sama adalah penerapan maksim relevansi. Hal ini muncul karena dalam pelaksanaan debat, lebih diperlukan jawaban yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan mitra tutur. Hal ini sejalan dengan tujuan debat untuk memperoleh keberhasilan dalam bertutur dengan cara memberikan jawaban yang sesuai. Adapun data yang dominan dalam prinsip kesopanan adalah penerapan maksim kebijaksanaan. Hal ini muncul karena sebagai salah satu calon presiden,

jawaban yang hendak diberikan kepada mitra tutur hendaknya bijaksana dan mengurangi keuntungan pada diri sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan.

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi sehingga menambah wawasan mengenai penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dalam sebuah tuturan.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan melakukan analisis penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan selain dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019 ini, misalnya tuturan Prabowo atau Sandiaga.
3. Bagi Ir. Joko Widodo sebagai subjek penelitian, penerapan maksim semestinya bisa ditingkatkan guna mencapai keberhasilan tujuan komunikasi dalam debat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arta, I Made Rai. 2016. “Prinsip Kerja sama dan Kesantunan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Saintifik”. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2016. Halaman 139-151. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cummings, Louise. 2007. *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendrikus, Dori Wuwur. 1991. *Retorika (Terampil Berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi, Bernegosiasi)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hermawan, Agus. 2015. “Penerapan

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Vol 9 No 1, Maret 2020

- Prinsip Kerja sama dalam Dialog ILC (Indonesia Lawyers Club), Tinjauan Pragmatik". Jurnal NOSI. Volume 3. Nomor 4. Tahun 2015. Halaman 478-487. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, K. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rakasiwi, A.A. Ratna dkk.2014. "Penerapan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Sainifik oleh Siswa Kelas IV SD Jembatan Budaya". Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa `Indonesia. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2014. Halaman -. Singaraja: UNDIKSHA.
- Rokhman, Fathur dan Surahmat.2020.*Linguistik Disrutif (Pendekatan Kekinian Memahami Perkembangan Bahasa)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suandi, I Nengah. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wendra, I Wayan. 2014. *Buku Ajar Penulisan Karya Ilmiah*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wijana, Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Yule, George. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.